

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZEN**Nastiti Mufidah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: nastiti@iainponorogo.ac.id

***Abstract:** The purpose of this paper is to review democratic education which is then constructed in an analysis in which it is revealed about how citizenship education as a vehicle for democratic education in an effort to realize smart and good citizens. The writing of this article is a descriptive explanatory type of writing that explains the urgency of constructing the role of citizenship education as a vehicle for democratic education in realizing smart and good citizens. This writing uses the method of literature study which is a method that bases on various media as a source of literature relating to civic education, democratic education and various efforts in realizing smart and good citizens. The analysis based on the findings concludes that democratic education must become an integrated education with all aspects of citizens' lives in order to be able to build a political awareness of society holistically. Citizenship education with the principle of "nation and character building" is a vehicle for the implementation of representative democratic education in which democracy is taught with the framework of nationality and nationality in building "smart and good citizens" as a form of democratic citizenship.*

***Abstrak:** Tujuan penulisan ini yakni mengulas pendidikan demokrasi yang kemudian dikonstruksi dalam analisis yang didalamnya terungkap tentang bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam upaya mewujudkan smart and good citizen. Penulisan artikel ini merupakan jenis penulisan Deskriptif Eksplanatif yaitu memaparkan urgensi pengkonstruksian peran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam mewujudkan smart and good citizen. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur yakni metode yang mendasarkan pada berbagai media sebagai sumber literatur yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan demokrasi serta berbagai upaya dalam mewujudkan smart and good citizen. Hasil analisis yang berdasarkan hasil temuan memberikan kesimpulan bahwa pendidikan demokrasi harus menjadi pendidikan yang terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan warganegara agar mampu membangun kesadaran politik masyarakat secara holistic. Pendidikan kewarganegaraan dengan prinsip "nation and character building" merupakan wahana implementasi pendidikan demokrasi yang representatif dimana demokrasi diajarkan dengan framework kenegaraan dan kebangsaan dalam membangun "smart and good citizen" sebagai wujud warganegara yang demokratis.*

Keywords: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Demokrasi, Smart and Good Citizen.

Copyright (c) 2020 Nastiti Mufidah

Received 2 Mei 2020, Accepted 2 Juni 2020, Published Juni 2020Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 (2), 2020 259

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa tahun 2004 merupakan momentum yang penting terkait dengan perjalanan demokrasi di Negara Indonesia. Dimana pada tahun 2004, merupakan awal perkembangan demokrasi terkait jaminan kebebasan berfikir, berbicara dan berserikat sehingga tidak ada lagi halangan apapun dalam wacana pengembangan sepenuhnya kemampuan-kemampuan manusia terutama dalam hal lain yang terkait dengan kenegaraan, seperti kontribusi dalam politik baik aktif maupun pasif, baik dalam pemilihan umum maupun dalam mempengaruhi *public policy* supaya berpihak pada hati dan nurani rakyat. Namun seiring berjalannya praktek demokrasi langsung dan gemuruh dari gelombang propaganda kebebasan, mulai bermunculan pertanyaan dari publik. Ketika momen pemilihan umum tahun 2004, peserta pemilu yang dipandang mampu serta berlandaskan visi dan misi yang gambling serta jelas dalam membangun bangsa, seperti Amien Rais, suaranya berada di urutan paling belakang.¹

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disandarkan pada pemenuhan hak sendiri dengan mengorbankan hak-hak orang atau warga lain adalah bentuk penghianatan terhadap rakyat banyak, sehingga korupsi sampai kapan pun adalah bentuk penyimpangan yang tidak dapat dimaafkan oleh etika dalam demookrasi. Selain itu, dalam menyikapi terkait dengan hak berekspresi, etika demokrasi menetapkan bahwa hak untuk melakukannya tidak boleh berlebihan sehingga melanggar maupun melampaui hak orang maupun warga Negara lainnya. Meskipun demikian demonstrasi atau menyampaikan pendapat tetap boleh dilakukan karena tahapan tersebut merupakan suatu kegiatan yang *urgent* dalam berdemokrasi, asalkan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan etika dan masih dalam koridor keamanan yang ditentukan.² Kemudian fakta *money politic* begitu nyata terasa menjelma menjadi serangan fajar pra-pemilihan umum dan dianggap mampu memobilisasi suara rakyat sehingga mutlak terkantongi. Pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan para pejabat Negara seolah menjadi cacatnya praktek demokrasi Republik.

Permasalahan dalam demokrasi di Negara Republik memang sangat berhubungan dengan PBM (Proses Belajar Mengajar) terutama berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), baik yang berada di jenjang dasar (Sekolah Dasar), jenjang menengah (Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas), maupun di jenjang

¹ Kholid Santoso. *Praktek Demokrasi Langsung di Indonesia* (Bandung: Segi Arsy, 2010), 7.

² Hendra Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 127.

kejuruan serta di perguruan tinggi. Permasalahan tersebut sarat dengan kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terutama pada konteks pembelajaran demokrasi. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipandang sangat kompleks itu dilihat dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat akan mobilisasi-mobilisasi masa demi kepentingan politis suatu golongan. Sedangkan cita-cita pendidikan Nasional khususnya pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan *smart and good citizen*. Penjelasan terkait dengan *Smart and good citizen* yang diungkapkan oleh Winataputra yakni warga negara (WN) yang mempunyai kemampuan terkait dengan 3 aspek yakni *civic disposition*, *civic knowledge*, serta *civic skill*. Selain itu, ketiga kemampuan tersebut harus disertai pula dengan cita-cita, konsep dan nilai yang berpegang pada prinsip demokrasi yang dapat dinilai melalui partisipasinya dalam pelaksanaan dan pembuatan kebijakan publik.³

Senada dengan pemaparan di atas, bahwasannya pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu wahana pembelajaran demokrasi belum begitu memberikan hasil memuaskan. Terutama dalam membina partisipasi warganegara yang dalam wacana penelitian ini partisipasi dalam konteks kenegaraan. Pendapat Huntington menyatakan bahwa partisipasi Warga Negara (WN) merupakan suatu proses dalam demokratisasi, sehingga diperlukan adanya suatu kegiatan dalam rangka mengedukasi setiap Warga Negara agar dapat secara bertanggung jawab dan cerdas dalam menyampaikan aspirasi ataupun berpartisipasi didalamnya.⁴

Masyarakat yang memiliki hak berfikir, berpendapat dan berserikat seharusnya mampu menjadi agen untuk mengontrol kinerja pemerintah terutama dalam masalah kebijakan. Selain itu mampu berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, artian partisipasi aktif menelaah dan menentukan siapa yang layak dan siap dari sudut pandang objektif warganegara terhadap kejelasan visi dan misi calon pemimpin. Juga mampu melayangkan kritik terhadap kinerja pemerintah lewat surat kabar atau pun aksi demonstrasi yang sesuai prinsip demokrasi etis. Tetapi kenyataan dilapangan dominasi partai penguasa dan pemegang modal besar adalah yang mampu memobilisasi isu dan pergerakan masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan tidaklah berkonsentrasi pada lingkup yang terbatas di jenjang pendidikan formal, namun oleh karena konteks pendidikan kewarganegaraan bersinggungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan kontribusi lingkungan

³ Udin Winataputra. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. (Bandung: Widya Aksara Press, 2012), 8.

informal dalam menunjang tujuan dari pendidikan kewarganegaraan untuk mencetak *smart and good citizen*. Dengan demikian kali ini kita berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai *citizenship education* yang memiliki cakupan yang lebih luas. Berikut pendidikan kewarganegaraan tersebut dijelaskan sebagai *Education for Citizenship or Citizenship Education* dengan penjelasan, “...both these in school experiencess as well as out of school or non formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen”.⁵

Dengan dasar penjelasan tersebut kita dapat menerangkan bahwa setiap sendi dalam kehidupan masyarakat harus memiliki andil dalam menyokong suksesti tujuan pendidikan kewarganegaraan. Sehingga konsentrasi kajian dari pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar dilakukan di lingkup pendidikan sekolah atau formal semata, melainkan dapat pula meluas pada lingkup pendidikan informal apabila konsentrasi kajian tersebut dipandang dari perspektif pendidikan. Didalam konteks pendidikan kewarganegaraan itu pula, kita dapat kaji kontribusi atau peran dari keluarga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media juga bagian lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dikategorikan kepada wahana dimana pendidikan kewarganegaraan berperan.

Berdasarkan dasar berbagai penjabaran terkait dengan latar belakang yang telah diungkapkan diatas dapat ditemukan beberapa permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan ini yakni, apakah pendidikan demokrasi itu serta bagaimana pula fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam mewujudkan *smart and good citizen*. Adapun manfaat teoritis dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penambahan wawasan mengenai pendidikan demokrasi juga sebagai langkah kajian lanjut terkait pengembangan konsepsi pendidikan demokrasi. Penulisan ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam membuat hipotesa suatu penelitian terutama mengenai pendidikan demokrasi termaktub guna mewujudkan *smart and good citizen*. Sedangkan secara praktis tulisan ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebagai materi pengajaran dalam perkuliahan yang membahas mengenai pendidikan demokrasi tetutama dalam mewujudkan *smart and good citizen*.

⁴ Syaifullah dan Sri Wuryan. *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)* (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI. 2009), 95.

⁵ Cogan. *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education* (Bandung: CISED, 1999), 4.
262 Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 (2), 2020

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan dalam membangun infrastruktur yang menunjang terwujudnya demokratisasi dalam satu negara. Namun realitanya, dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang di ajarkan di Indonesia, pendidikan demokrasi lebih mengesankan diajarkan atau istilahnya “*Tough*” dan justru bukan menitik beratkan untuk dipelajari atau istilahnya “*learned*”. Berbagai peran yang dilakukan oleh pengajar baik guru dosen maupun manggala menjadi lebih dominan oleh karenanya dapat dikatakan bahwa situasi pembelajaran lebih condong bersifat “*dominative*” dari pada “*integrative*”.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu wahana pembelajaran demokrasi belum begitu memberikan hasil memuaskan. Terutama dalam membina partisipasi warganegara yang dalam wacana penelitian ini partisipasi dalam konteks kenegaraan. Huntington yang dikutip oleh Syaifullah dan Sri Wulan menyatakan bahwa dalam proses demokratisasi terkait dengan partisipasi atau keikutsertaan warga Negara, oleh karena itu sangat perlu adanya persiapan untuk membentuk warga Negara yang mampu berpartisipasi baik secara cerdas maupun bertanggungjawab.⁷ Masyarakat yang memiliki hak berfikir, berpendapat dan berserikat seharusnya mampu menjadi agen untuk mengontrol kinerja pemerintah terutama dalam masalah kebijakan. Selain itu mampu berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, artian partisipasi aktif menelaah dan menentukan siapa yang layak dan siap dari sudut pandang objektif warganegara terhadap kejelasan visi dan misi calon pemimpin. Juga mampu melayangkan kritik terhadap kinerja pemerintah lewat surat kabar atau pun aksi demonstrasi yang sesuai prinsip demokrasi etis.

Namun menurut Sumantri dikutip oleh Winatraputra menyatakan bahwa kenyataan dilapangan menunjukkan adanya dominasi partai penguasa dan pemegang modal besarlah yang memobilisasi isu dan pergerakan masyarakat. Dengan demikian sejak tahun 1945 hingga sekarang masih menunjukkan kondisi “*undemocratic democracy*”, yakni merupakan suatu keadaan yang mana ketercapain dari cita-cita demokrasi masih belum terpenuhi, kendatipun perangkat demokrasi telah ada atau dapat dikatakan telah terpenuhi. Oleh karena keadaan

⁶ Winatraputra. *Seminar dan Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan* (Operation Room, Gedung Rektorat UNPAR Bandung. Tanggal 27-28 Mei 2012), 70.

tersebut, maka memunculkan berbagai kontroversi ataupun dapat dikatakan sebagai berbagai ketimpangan antara norma dengan realita yang terjadi dilapangan. Berbagai ketimpangan tersebut dapat dilihat dari realita yang terjadi sangat jauh dari apa yang dipidatukan, diceramahkan, maupun diajarkan selama ini.⁸ Ole karenanya membangun partisipasi masyarakat sebagai bagian dari cita-cita demokrasi salah satunya adalah mewujudkan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi.

Pernyataan Soekarno yang dikutip Yudi Latif menjelaskan bahwa dengan hanya menggunakan demokrasi-politik, tidak akan mampu menyelamatkan rakyat Indonesia. Contohnya seperti beberapa Negara yakni Amerika, Perancis, Nederland, Inggris yang dimana telah menjalankan system demokrasi namun masih merajalelanya system kapitalisme dan kaum Mahaen-nya. Oleh karena itu, kaum nasionalis yang ada di Indonesia janganlah mengamalkan system demokrasi yang semacam itu.⁹ Pandangan Soekarno terhadap kekeliruan demokrasi asing yaitu pada perlunya Negara kita mempunyai konsep terkait dengan nasionalisme dan demokrasi mandiri, yang dia namakan sebagai “sosio-nasionalis” atau “sosio-demokrasi”.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipandang sangat kompleks itu dilihat dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat akan mobilisasi-mobilisasi masa demi kepentingan politis suatu golongan. Sedangkan cita-cita pendidikan Nasional khususnya pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan *smart and good citizen*. Dalam hal ini *Smart and good citizen* mempunyai pengertian yakni warga Negara yang menguasai berbagai persoalan (*well-informed/enlightened*) yang disertai dengan 3 kompetensi kewarganegaraan yakni *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skill* yang mumpuni. Serta mempunyai suatu komitmen (*committed*) akan nilai, cita-cita, konsep maupun prinsip semokrasi yang digunakan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta tanggung jawab (*responsible*) sebagai warganegara. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui keikutsertaannya dalam pelaksanaan ataupun pembuatan kebijakan publik.¹⁰

⁷ Syaifullah dan Sri Wuryan. *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*. (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI. 2009), 95.

⁸ Winataputra. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. (Bandung: Widya Aksara Press. 2012), 75.

⁹Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011), 410.

¹⁰Winataputra. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. (Bandung: Widya Aksara Press. 2012), 8.

Proses demokratisasi melalui pendidikan formal maupun informal, diperlukannya suatu perangkat pengalaman (*learning experiences*) dalam memberikan pendidikan demokrasi maupun terkait dengan pendidikan Hak Asasi Manusia. *Learning Experience* tersebut dapat diwujudkan melalui kurikulum atau program belajar ataupun pembelajaran yang dapat memandu terjadinya proses pengembangan nilai, cita-cita, konsep maupun prinsip demokrasi pada peserta didik secara praktik. Oleh karenanya upaya yang sistematis sangat diperlukan dalam merancang sebuah kurikulum pendidikan yang dapat menjadi sarana pendidikan demokrasi guna terciptanya tatanan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai masyarakat demokratis. Proses rekonseptualisasi Pendidikan Pancasila dalam hal ini diperlukan guna memberikan pendidikan terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia.¹¹

Menurut Penelitian Gandal dan Finn yang dikutip oleh Winataputra menyatakan bahwa bukan saja dinegara yang sedang berkembang tetapi juga di Negara yang sudah maju pendidikan demokrasi (*education for democracy*) dianggap sangat penting, namun lebih lanjut mereka menyatakan bahwa realita dilapangan: "...it is often taken for granted or ignored" yang mengandung artian bahwa kerap kali hal tersebut malah justru dianggap enteng atau dilupakan. Maka lebih lanjut ditegaskan oleh Gandal and Finn bahwa, "*democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it*". Pernyataan tersebut mengandung artian bahwasanya pendidikan demokrasi adalah merupakan sebuah pendidikan yang tidak akan mampu mengajarkannya sendiri. Jikalau tanggung jawab, kekuatan maupun manfaat dari demokrasi tidak mampu dipahami serta dihayati oleh warganegara dengan baik, maka pupuslah harapan agar warga Negara bersedia berjuang dalam mempertahankannya. Penekanan lebih lanjut dikatakan bahwa: "*Education for democracy, therefore, must be approached in a conscious and serious manner*" yang artinya bahwa pendidikan demokrasi haruslah dilaksanakan secara sadar serta sungguh-sungguh.¹²

Maka dari itu dengan merekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan harus mampu mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dan memanfaatkan hak-hak demokrasinya. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi memiliki peran membawa warganegara dalam Negara demokratis. Dalam hal ini warga Negara

¹¹ Ibid, 71.

¹² Naval, Concepcion; Print, Murray & Veldhuis, Ruud. "Education for Democratic Citizenship in the New Europe: Context and Reform". *European Journal of Education*. Vol. 37. No. 2. 2002), 114.

diharapkan mampu pengembangan kemampuan berpartisipasi serta tanggung jawabnya sebagai warganegara yang demokrasi baik dalam tatanan kehidupan budaya, politik, social, serta ekonominya.

PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEWUJUDKAN *SMART AND GOOD CITIZEN*

Manusia sebagai sasaran dari pendidikan yang dalam konteks Negara Republik Indonesia selanjutnya kita sebut sebagai Warga negara. Secara tidak langsung Tujuan Pendidikan Nasional kita mengarah pada pembentukan *smart and good citizen*. Aristoteles didalam buku filsafat politiknya mengungkapkan bahwa “Pendidikan merupakan fenomena yang bersifat universal”, ungkapan tersebut sangatlah benar adanya, hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan dan keberadaan setiap Negara yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Dengan pendidikan sebuah Negara akan mampu menghasilkan warga Negara yang terampil, cerdas serta mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di negaranya. Khususnya dalam rangka mewujudkan *smart and good citizen* pemerintah Negara Republik Indonesia telah semenjak lama memasukan program mata pelajaran/kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diharapkan mampu menjadi bagian dari instrumentasi pendidikan nasional dalam membentuk identitas bangsa.¹³ Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) digolongkan menjadi lima yakni sebagai; (1) Mata pelajaran di sekolah; (2) Mata kuliah di kampus/perguruan tinggi; (3) Salah satu cabang pendidikan dalam disiplin ilmu pengetahuan sosial yang termasuk ke dalam kerangka program pendidikan guru (PPG); (4) Program pendidikan politik yakni sebagai suatu *crash program*; serta (5) Kerangka konseptual dalam membentuk konsep pemikiran individual serta kelompok pakar terkait, yang selanjutnya dapat dikembangkan sebagai landasan serta kerangka berfikir tentang pendidikan kewarganegaraan.¹⁴ Pendapat dari Cogan yang dikutip dari buku panduan kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan tinggi oleh Ganjar dan Wilodati mengemukakan bahwa *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, yaitu suatu mata pelajaran

¹³ M Mukhibat, Mukhlison Effendi, "Strengthening of National Identity Through Personality Development Based on EthnoPedagogy at Higher Education" *Psychosocial: International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24 Issue 4 (Februari, 2020), 2549.

¹⁴ Ganeswara dan Wilodati. *Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. (Bandung: Yasindo Multi Aspek. 2002), 1.

dasar di sekolah sebagai yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.¹⁵

Pendapat Huntington (1991) yang dikutip oleh Syaifullah dan Sri Wuryan mengungkapkan proses demokratisasi sangat berkaitan dengan partisipasi warga negara, oleh karenanya diperlukan penyiapan warga Negara dengan tujuan supaya dapat warga negara tersebut mampu berpartisipasi secara cerdas maupun bertanggung jawab. Dalam hal ini, kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipandang sangat kompleks itu dilihat dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat akan mobilisasi-mobilisasi masa demi kepentingan politis suatu golongan. Sedangkan cita-cita pendidikan Nasional khususnya pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan *smart and good citizen*.¹⁶

Dalam upaya mewujudkan demokratisasi melalui program pendidikan formal dan informal, dalam hal ini pendidikan demokrasi maupun Hak Asasi Manusia sangatlah memerlukan berbagai perangkat pengalaman belajar atau biasa disebut sebagai *learning experiences*. *Learning experience* tersebut dapat diwujudkan melalui kurikulum/program belajar dan pembelajaran yang dapat memandu keberlangsungan proses pencapaian nilai, pengembangan cita-cita, pemahaman konsep serta terlaksananya prinsip demokrasi dalam diri peserta didik secara pragmatik. Oleh karenanya sangat dibutuhkan adanya suatu upaya yang secara sistematis dan sistemik untuk merancang kurikulum pembelajaran yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu diperlukan proses rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia guna mewujudkan *smart and good citizen*.

Ketercapaian dalam mewujudkan pendidikan demokrasi dalam mewujudkan *smart and good citizen* tidak terlepas dari visi dan misi pendidikan demokrasi itu sendiri. Dimana visi dari pendidikan demokrasi yakni, sebagai wahana *substantive*, pedagogis, dan sosial-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks. Melalui wawasan dan pengalamannya itu baik secara individual maupun berkelompok warganegara diharapkan untuk mampu memberikan sumbangsih atau kontribusi yang bermakna guna meningkatkan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Inilah makna dari "*learning democracy, through*

¹⁵ Ibid, 4.

¹⁶ Syaifullah dan Sri Wuryan. *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*. (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI. 2009), 95.

democracy, and for democracy". Bermula dari visi di atas, maka dirumuskanlah misi dari pendidikan demokrasi yakni: (1) Memberikan fasilitas kepada warga negara agar dapat dengan mudah mendapatkan berbagai akses serta mampu menggunakannya secara cerdas berbagai sumber informasi baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi yang dimaksud yakni demokrasi baik secara teori maupun praktek yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai konteks kehidupan sehingga warga Negara tersebut memiliki wawasan yang luas serta memadai (*well-informed*). (2) Memfasilitasi warga negara agar mampu melakukan kajian konseptual maupun operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya tersebut. (3) Mefasilitasi warga negara agar mendapatkan serta memanfaatkan kesempatan dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab dan cerdas di dalam praktek kehidupan demokrasi di lingkungannya. Berbagai partisipasi tersebut diantaranya yakni dalam hal mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, dipilih dan memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.¹⁷

PENUTUP

Pendidikan Demokrasi merupakan kebutuhan pokok dari suatu negara bersistem politik demokrasi. Pendidikan demokrasi harus menjadi pendidikan yang terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan warganegara agar mampu membangun kesadaran politik masyarakat secara holistik. Pendidikan demokrasi harus diimplementasikan kedalam suatu pendidikan yang mampu menjadi solusi permasalahan demokrasi Indonesia yang masih berada pada status *undemocratic democracy*. Sehingga berdasarkan rumusan yang dibentuk dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Demokrasi merupakan pendidikan yang berbagai kontennya dirancang dengan tujuan membina masyarakat demokratis. Pendidikan demokrasi bukan sekedar diwujudkan dalam suatu matapelajaran husus atau kajian disiplin khusus, namun harus menjadi iklim pendidikan pada suatu negara demokrasi, sehingga sekolah atau kelas dalam lingkup kecil harus mewujudkan suasana yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan dengan prinsip "*nation and character building*" merupakan wahana implementasi pendidikan

¹⁷Winataputra, Udin S. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. (Bandung: Widy Aksara Press. 2012), 194-195.

PKn sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi dalam Mewujudkan *Smart and Good Citizen*

demokrasi yang representatif dimana demokrasi diajarkan dengan *framework* kenegaraan dan kebangsaan dalam membangun “*smart and good citizen*” sebagai wujud warganegara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Cogan, J.J. *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED, 1999.

Ganeswara, Ganjar M & Wilodati. *Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Yasindo Multi Aspek, 2002.

Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

M, Mukhibat, Effendi, Mukhlison, "Strengthening of National Identity Through Personality Development Based on EthnoPedagogy at Higher Education" *Psychosocial: International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24 Issue 4 (Februari, 2020), 2549.

Naval, Concepcion; Print, Murray & Veldhuis, Ruud, "Education for Democratic Citizenship in the New Europe: Context and Reform". *European Journal of Education*. Vol. 37. No. 2 (2002).

Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Santosa, Kholid O. *Praktek Demokrasi Langsung di Indonesia*. Bandung: Segi Arsy, 2010.

Syaifullah dan Sri Wuryan, *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, 2009.

Winataputra dan Budimansyah, *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi PKn SPs UPI, 2007.

Winataputra, Udin S, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press, 2012.